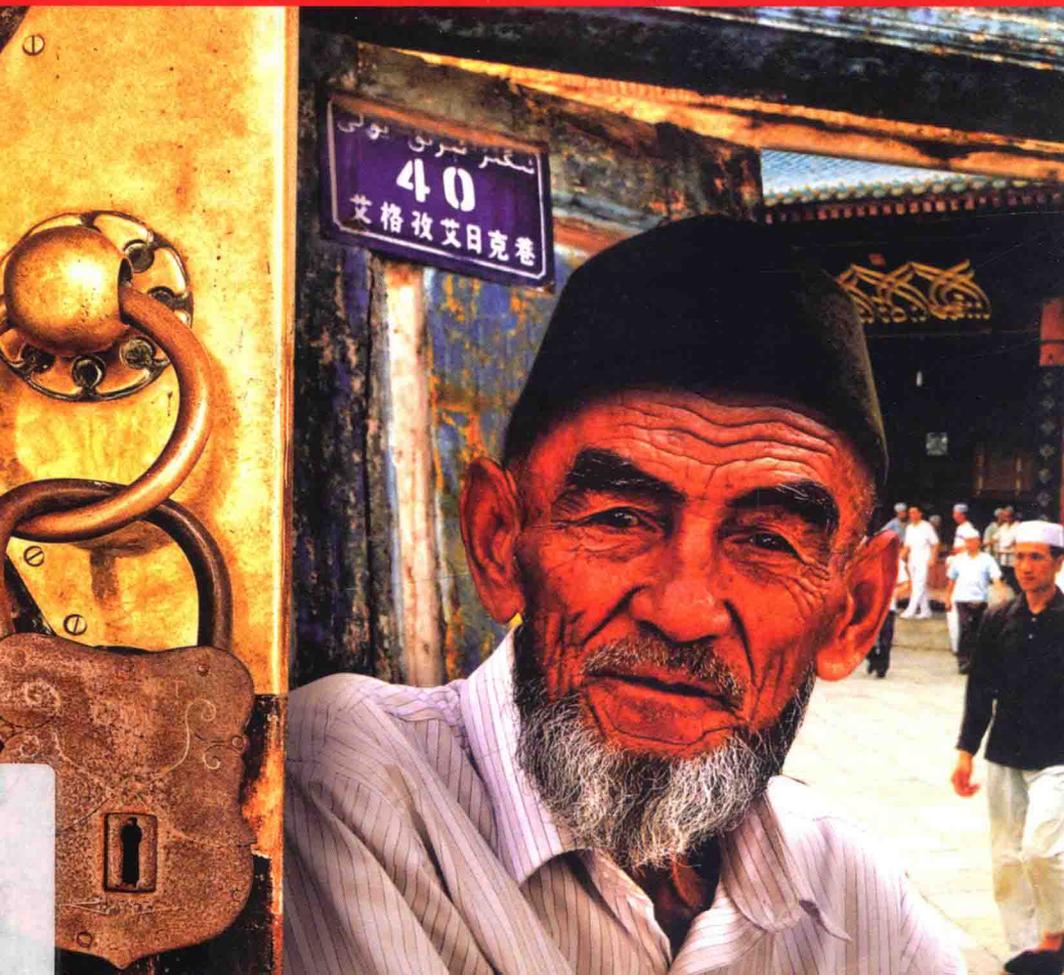


Afthonul Afif

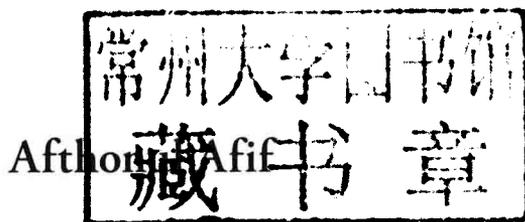
# IDENTITAS TIONGHOA MUSLIM INDONESIA

PERGULATAN MENCARI JATI DIRI



# IDENTITAS TIONGHOA MUSLIM INDONESIA

PERGULATAN MENCARI JATI DIRI



PENERBIT  
KEPIK

# **IDENTITAS TIONGHOA MUSLIM INDONESIA**

Pergulatan Mencari Jati Diri

© Afthonul Afif

Penyunting  
Muhammad Damm

Desain sampul  
Dwi "Pengkik" Mugianto

Pewajah isi  
Tim Kepik

## **PENERBIT KEPIK**

Jl. Nusantara A11/10, Bukit Cengkeh 1,  
Cimanggis, Depok, Jawa Barat 16951  
Email: [kepik\\_ungu@yahoo.com](mailto:kepik_ungu@yahoo.com)

Cetakan pertama Februari, 2012

Hak cipta dilindungi undang-undang

Afif, Afthonul

*Identitas Tionghoa Muslim Indonesia: Pergulatan Mencari Jati Diri*

Depok, Kepik 2012

xx + 352 hlm.; 15,5 cm x 24 cm

ISBN: 978-602-99608-2-2

# IDENTITAS TIONGHOA MUSLIM INDONESIA

PERGULATAN MENCARI JATI DIRI

**Untuk Kemal dan Kinar**

## PENGANTAR PENULIS

Pada suatu sore di awal 2008, saya mengalami peristiwa penting yang kemudian menjadi cikal-bakal lahirnya buku ini. Sesaat se usai saya menunaikan salat asar di salah satu masjid di pusat kota Yogyakarta, seorang laki-laki Tionghoa setengah baya tiba-tiba memasuki masjid. Dia berjalan mendekat ke arah tempat saya duduk untuk melaksanakan salat. Ketika laki-laki tersebut sedang menyelesaikan salatnya, saya beranjak keluar dan memutuskan untuk duduk-duduk dulu di teras masjid. Saya kemudian bertanya kepada salah seorang penjaga masjid tentang identitas laki-laki tersebut. Si penjaga masjid mengatakan dia salah seorang jamaah yang terbilang rajin berkunjung ke masjid ketika waktu salat tiba. Saya memutuskan menunggunya keluar dari masjid dan bermaksud mengajaknya berkenalan. Di luar dugaan, dia terlihat senang menyambut ajakan saya. Kami pun berbincang sejenak, hingga akhirnya dia menutup perbincangan dengan sebuah senyum yang bersahabat.

Kejadian tersebut meninggalkan kesan mendalam bagi saya dan banyak pertanyaan di benak saya. Apa gerangan yang membuat laki-laki itu memutuskan untuk menjadi seorang Muslim? Bagaimana dia menjalani kehidupan bermasyarakat dengan identitasnya sebagai Muslim? Bagaimana pula respons orang-orang Tionghoa secara umum terhadap keputusannya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut begitu mengusik rasa ingin tahu saya, hingga kemudian saya memutuskan untuk mencari jawaban-jawabannya.

Semua terasa seperti kebetulan, karena pada saat itu saya sedang berpikir keras mencari topik penelitian yang “pas” untuk penulisan tesis saya. Setelah mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang bakal dihadapi, saya akhirnya memutuskan untuk mengambil konteks kehidupan orang Tionghoa Muslim sebagai topik penelitian saya, terutama bagaimana cara-cara yang mereka tempuh dalam membentuk identitasnya. Mulailah saya mengumpulkan sedikit demi sedikit informasi yang berkaitan dengan seluk-beluk kehidupan mereka di Indonesia, selain juga menjalin kontak dengan mereka untuk keperluan pemilihan responden dan informan.

Satu hal yang kemudian membuat saya terkesan untuk kedua kalinya, adalah ketika saya membaca sejarah penyebaran Islam di Nusantara. Ternyata orang-orang Tionghoa memainkan peran yang tak kalah besarnya dengan para penyebar Islam dari Arab atau Gujarat, misalnya. Bahkan menurut banyak sumber, sebagian besar para penyebar Islam di Pulau Jawa waktu itu, yang belakangan kita kenal sebagai *Wali Sanga* atau Wali Sembilan, ternyata berdarah Tionghoa.

Buku ini merupakan hasil penulisan ulang tesis saya, yang *alhamdulillah* berhasil saya pertahankan di Program Pascasarjana Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Mengingat mustahil bagi penelitian ini untuk mengungkap semua aspek kehidupan orang Tionghoa Muslim Indonesia, maka saya kemudian memfokuskan diri untuk mengetahui tentang dinamika psiko-sosial terkait dengan proses pembentukan identitas mereka dalam konteks Indonesia pasca-Orde Baru.

Banyak kesulitan dan tantangan yang saya alami selama penelitian hingga penulisan buku ini. Namun, semua itu terasa lebih mudah saya lewati berkat bimbingan penuh dedikasi dan apresiasi yang tulus dari pembimbing saya, Prof. Dr. Faturochman, M.A., dan kedua penguji saya, Prof. Dr. Bimo Walgito, dan Dra. Nuryati Attamimi, S.U. Secara tulus saya sampaikan ucapan terima kasih kepada beliau-beliau tersebut. Kepada guru-guru saya, Prof. Dr. Johana E. Prawitasari, Prof. Dr. Noor Rochman Hadjam, Dr. Sofia Retnowati, Dr. Tina Afiatin, Dr. Subandi, saya juga menyampaikan terima kasih yang mendalam atas diskusi dan kelas-kelasnya yang inspiratif.

Terima kasih yang setulus-tulusnya juga saya sampaikan kepada Pak Budi, Thomas, Lia, Ana, Anto dan Yanti, Hasan, Pak Wi, Hendra, dll. yang telah bersedia menjadi responden dan informan untuk penelitian ini. Informasi dan persahabatan yang kalian berikan sungguh berharga bagi saya. Semoga kalian mampu menjadi suluh bagi masyarakat di mana pun kalian berada. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Mbak Ikoh, Imad, Ima, Hima, Dina, Mbak Novi, Teh Lilis, juga Nelly, teman-teman seperjuangan selama menyelesaikan program Master Psikologi Klinis di Fakultas Psikologi UGM, atas dukungan moral dan kebersamaannya. Semoga kalian senantiasa dalam limpahan karunia Tuhan Yang Maha Pemurah.

Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya di Parikesit Institute dan Bale Sastra Kecapi Yogyakarta-Solo, Cipto, Aim, Tia, Sunli, Koto, Ipang, Afris, Faisal, Nurul "Hartojo" Hanafi, Bandung "Kabut" Mawardi, Antok, atas diskusi dan curhat-curhat kebudayaannya yang hangat dan inspiratif. Kepada Khidir "Id" Marsanto dan Endy Saputra, terima kasih telah menjadi

teman diskusi ketika kebuntuan-kebuntuan gagasan sedang menyandera. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Erwin Natosmal. Ucapan terima kasih dan apresiasi yang mendalam khusus saya sampaikan kepada Geger Riyanto dari Penerbit Kepik, seorang sahabat sekaligus “mandor” yang begitu sabar menunggu rampungnya penulisan buku ini. Saya minta maaf atas keterlambatannya. Semoga kita tetap bisa bekerja sama di waktu-waktu mendatang. Juga kepada Muhammad Damm, terima kasih atas ketelitian membaca naskah ini dan diskusinya yang sangat bermanfaat.

Saya sampaikan terima kasih yang mendalam kepada Pak Nor Wachid dan Bu Rufi’ah, kedua orang tua saya, juga Titik Indah Mulyani, adik saya, atas kebersamaan dan kasih sayangnya yang tulus selama ini. Terima kasih juga untuk Papa dan Mama, tanpa pengertian dan dukungan kalian, proses penulisan buku ini tentu akan menyita waktu dan membutuhkan energi yang berlipat-lipat. Khusus untuk “Dek” Ganjur, terima kasih atas senandung-senandung “*alay-nya*” yang sering kali menginterupsi dengan telak, meski terkadang juga menjadi sumber hiburan dan tawa yang sesungguhnya.

Tidak lupa kepada istri saya, Gilang Desti Parahita. Barangkali maaf tidak lagi cukup untuk menebus hak-hakmu yang tertunda selama penulisan buku ini. Izinkan saya menebusnya dengan menulis buku-buku selanjutnya (hehe...). *To my everything*, Kemal dan Kinar, sumber kekuatan batin yang membuat semua kisah menjadi (hanya) bahagia. Karya ini Ayah persembahkan untuk kalian.

Buku ini tentu tidak luput dari banyak kekurangan, untuk itu saya sangat berterima kasih atas kritik dan komentar konstruktifnya dari pembaca yang budiman. Semoga karya sederhana ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat Indonesia. Selamat membaca!

## **Penulis**

Penghujung Mei 2011, menjelang kelahiran Kinar.

PENGANTAR

# DARI CINA MUSLIM UNTUK INDONESIA *WITH LOVE*

HANNEMAN SAMUEL<sup>1</sup>

## I

Pesan apa yang bisa kita petik dari tulisan Afthonul Afif?

Sebelum kita jawab pertanyaan ini, ada baiknya kita menelusuri kembali jawaban atas pertanyaan “mengapa identitas?”

Kajian tentang identitas kultural sesungguhnya bukan *Indonesian made*. Bahkan istilah *identitas* kita peroleh melalui penerjemahan *identity*. Masih segar dalam ingatan saya bagaimana guru-guru saya mengajarkan, identitas merupakan kajian psikologis. Identitas merujuk pada atribut individual, sementara sosiologi mengkaji *human groupings*, mulai dari kelompok kecil sampai dengan masyarakat.

Perkenalan saya sendiri dengan identitas dimulai sedari saya membahas gagasan Peter Berger dan Thomas Luckmann. Dalam buku *The Social Construction of Reality*, keduanya berhasil meyakinkan saya bahwa, lebih dari sekadar kajian psikologis, identitas juga merupakan kajian dalam ranah sosiologi. Tentu yang mereka maksud adalah sosiologi Eropa Barat yang dikembangkan di Amerika Utara. Kami, para sosiolog, pada waktu itu—dan sepanjang sejarah Orde Baru—menganggap kajian tentang identitas tidak terlalu menarik. Kami tetap setia mengkaji struktur sosial, proses sosial, pelembagaan sosial, dan berbagai atribut *human groupings* lainnya, tema-tema yang sejalan dengan pembangunan (ekonomi) nasional berdasarkan perspektif modernitas.

Tiba-tiba, mendadak perhatian orang mulai beralih pada persoalan identitas. Sekali lagi, bukan sosiolog Indonesia yang berada di garis depan, namun lantaran menguatnya partai *One Nation* di Australia, Neo-Nazi di

---

<sup>1</sup> Penulis, dosen sosiologi Universitas Indonesia, dapat dihubungi melalui hanneman\_samuel@yahoo.com atau hanneman.samuel09@ui.ac.id.

Jerman maupun Eropa pada umumnya. Ada kalangan tertentu, umumnya kaum migran, yang terancam keberadaannya. Mulailah orang-orang sadar bahwa identitas bersifat politis. Identitas kultural, seperti yang dikemukakan oleh Castells (2001), merupakan sesuatu yang ditegakkan lewat perjuangan. Semua ini tak lepas dari globalisasi/neoliberalisme yang melanda Eropa Barat dan Amerika Utara. Warga kelompok mayoritas merasa terancam (secara ekonomis) dengan membanjirnya migran dari Asia dan Afrika. Kaum *new migrants* ini dianggap telah merebut lapangan kerja mereka.

Hal ini cukup mengejutkan. Namun, kaum intelektual cukup sigap dan mulai menggali wacana-wacana identitas. Lewat upaya ini, mereka berinisiatif mencegah runtuhnya bangunan *cultural, economic, social rights*. Mereka tidak lagi membeda-bedakan diri menurut garis disiplin keilmuan, juga tidak meremehkan peran penting para aktivis, termasuk aktivis gender.

Di mana posisi Indonesia dalam kajian tersebut?

Kita pun sadar, ada persoalan politik dengan identitas di rumah besar kita. Persoalan tersebut bahkan mungkin lebih besar dari persoalan yang dihadapi di Eropa Barat dan Amerika Utara. Masih segar dalam ingatan kita konflik Maluku, konflik Poso, persoalan Aceh, persoalan Papua, persoalan Cina, saling curiga lintas dan dalam agama. Namun, masalah kajian politisasi identitas kita bukan hanya berbeda dengan di Barat dalam dimensi besaran. Tanpa mengecilkkan permasalahan skala, menurut saya, ada perbedaan mendasar.

Perbincangan persoalan identitas di Eropa Barat dan Amerika Utara, menurut saya, tetap berpangkal pada promosi dan perlindungan identitas dalam dinamika kehidupan umat manusia yang berubah di abad ke-21. Sementara itu, masyarakat Indonesia serta masyarakat-masyarakat bekas jajahan belakangan mengalami kebangkitan sentimen untuk merehabilitasi identitas. Bahkan, pada kalangan-kalangan tertentu, persoalannya lebih parah lagi: mereka ujung-ujungnya mengalami internalisasi identitas yang sebenarnya tidak pernah mereka kenal. Pada masyarakat-masyarakat ini, ada perasaan bahwa mereka memiliki *collective memory* yang harus mereka pulihkan dan, konon, dahulu kala, identitas merupakan hal yang tidak bermasalah.

Namun, ilmu sosial Eropa Barat dan Amerika Utara juga memiliki kontribusi penting untuk membantu kita memahami persoalan ini. Ia menggugat sifat *taken for granted* dari identitas, dan memperkenalkan kita pada konsep politisasi identitas dan sisi problematis identitas. Memang, amat disayangkan, orang Indonesia yang mengalami permasalahan, ujungnya intelektual Eropa Barat dan Amerika Utara yang memberikannya nama.

## II

Politisasi identitas memang suatu permainan yang menarik namun berbahaya dan membahayakan. Di tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, permainan ini bisa mendatangkan kematian. Indonesia kaya dengan berbagai peristiwa kemanusiaan akibat permainan politisasi identitas. Namun, menyimpannya di bawah karpet tidak berarti lebih baik. Hal ini hanya menguntungkan aktor-aktor intelektual, yang—sering kali—justru menyembunyikan politisasi identitas dan diuntungkan dengannya.

Apa yang sepatutnya kita lakukan? Jawaban saya mungkin mengagetkan: politisasi identitas selayaknya kita jadikan bagian dari kekayaan kultural bangsa. Artinya, kita menginsyafi bahwa identitas bukanlah sesuatu yang terberi, baku, melainkan suatu proses yang diperjuangkan. Dan, cepat atau lambat, makin banyak orang Indonesia yang akan menghargainya. Beberapa waktu lalu, mahasiswi saya, Erniwati, menyelesaikan disertasi doktoralnya di UI tentang Cina Padang, dan penelitiannya memperlihatkan bahwa Cina Padang cenderung membedakan diri (dan dibedakan) dari Cina Udik, Cina Semarang, atau Cina Jawa. Ada kebanggaan tersendiri ketika mengatakan “saya orang Cina Padang”, kebanggaan sebagai hasil perjuangan kultural. Itulah hak mereka untuk merasa bangga. Mereka tidak melanggar hukum. Bahkan, mereka mampu memberi nuansa tersendiri kepada Indonesia.

Dan yang tidak kalah pentingnya, temuan ini menegaskan: *Indonesian Chinese*—orang Cina yang (kebetulan) bermukim di Indonesia—hanyalah imajinasi kalangan tertentu. Penelitian Erniwati kian meneguhkan pandangan saya bahwa orang Indonesia-Cina, dalam proses pembentukan identitasnya, justru berkecenderungan untuk mengidentifikasi diri dengan daerah tertentu di wilayah Kepulauan Nusantara.<sup>2</sup>

Tentang proses perjuangan identitas, Lim Sing Meij juga menemukan hal serupa. Meij, yang melangsungkan studinya di program doktoral sosiologi UI, meneliti bagaimana dinamika perempuan Cina profesional non-Muslim dalam dunia kerja lelaki. Diilhami premis-premis mendasar *postcolonial feminism*, Meij menemukan bahwa kemampuan memainkan peranan dengan baik merupakan kunci sukses para perempuan tersebut. Bukan hanya untuk sekadar bertahan, tapi juga mengembangkan diri, keluarga, serta memajukan Indonesia.

Irsyad Zamjani, dalam tesis magisternya, juga menemukan hal yang tidak jauh berbeda. Dia menyarankan kita untuk mengkaji ulang konsepsi kita tentang Indonesia. Berbeda dengan masa Orde Baru, negara kini tidak kuasa lagi memonopoli diskursus tentang Indonesia dan mengeksklusi

<sup>2</sup> Karena pertimbangan itu pula saya gunakan istilah “Indonesia-Cina” (Chinese-Indonesians)—bukan “Indonesian-Chinese”. Mereka, *first of all*, orang Indonesia.

konsepsi dari berbagai kelompok masyarakat sipil. Masing-masing kelompok mengungkapkan imajinasinya sendiri tentang masa silam dan masa depan Indonesia. Imajinasi Walhi, misalnya, berbeda tentang imajinasi Perhimpunan Indonesia Tionghoa, atau Freedom Institute. Lalu, Indonesia itu seperti apa? Apa pun jawaban yang mungkin tercetus, pantaslah kita mengingat ucapan Gus Dur yang mengutip Soekarno, “kita punya alasan untuk berbangsa.”

Izinkan saya berhenti sejenak pada titik ini dan memetik pesan dari penelitian Afthonul Afif. Menurut saya, pesan penting dari hasil riset lapangan Afif adalah bahwa Cina Muslim tidak homogen. Berbagai variasi muncul dan berkembang, sedemikian masifnya sehingga mereka sama sekali tidak bisa dikatakan monolitik. Mereka berbeda, antara lain, berdasarkan agama, daerah asal, gender, umur, dan pekerjaan. Ketika dilihat dengan cara demikian, penelitian Afif mendatangkan faedah membongkar prasangka tak berdasar yang meluas tentang orang Cina Indonesia.

Namun, terhadap kedua doktor lulusan Universitas Indonesia di atas—serta orang-orang lain yang hendak meneliti politisasi identitas—satu pertanyaan saya ajukan ketika mereka menemui saya untuk pertama kali: mengapa ingin meneliti tentang Orang Indonesia-Cina? Pertanyaan tersebut cukup sulit. Namun saya punya alasan untuk mengajukannya; *as a matter of fact*, juga teruntuk setiap orang yang akan melakukan penelitian tentang politisasi identitas. *Why?*

Penelitian, sejak dahulu, dilakukan sebagai upaya untuk memecahkan persoalan (sosial) tertentu. Dengan demikian, artinya, penelitian ilmiah dilakukan untuk *normalisasi* keadaan—sebagaimana yang diungkapkan Said dalam bukunya, *Orientalism*. Bila seseorang tak memahami intensi penelitiannya dengan kritis, bisa-bisa risetnya tergelincir menjadi salah satu rantai dari rezim normalitas yang ada.

Aktivitas-aktivitas sosial orang Indonesia keturunan Cina selama ini kerap disorot dengan ganjil, secara khusus juga keberadaan orang Indonesia-Cina Muslim. “Mengapa orang Cina yang seharusnya mengaspirasikan kebebasan justru menganut kepercayaan yang mengekang?” “Jangan-jangan mereka melakukan *trade-off*?” Orang Indonesia-Cina kerap dipandang kontradiktif dengan agama Islam. Aneh, sebab, Islam merupakan agama yang terbuka. Orang Indonesia-Cina pun bukanlah benda mati yang akan terus-menerus diam dan hanya membenarkan asumsi penuh prasangka tentang dirinya.

Seandainya bukan orang Indonesia-Cina yang bermasalah, di mana letak permasalahannya?<sup>3</sup>

Untuk menemukannya, jangan menyusuri hilirnya. Kita perlu mencari hulu dari politisasi identitas. Berbagai persoalan (yang telah, sedang, dan akan terus timbul-tenggelam) di hilir bersumber dari hulu. Ariel Heryanto (2004) pernah mengatakan bahwa kecinaan merupakan stempel penguasa Orde Baru. *It was socially fabricated*. Hal senada dikemukakannya juga dalam *State Terrorism* (2006); negara memanipulasi politisasi identitas untuk keperluan *regime maintenance*.

Menurut Heryanto, ada beberapa kalangan yang mengalami marginalisasi selama masa Orde Baru, yakni orang Indonesia-Cina, orang Indonesia-Muslim, dan mereka yang dianggap anggota PKI. Dari waktu ke waktu terjadi pengendalian atas kehidupan mereka. Kerja sama di antara orang Indonesia-Cina dengan orang Indonesia-Muslim, misalnya, dianggap sebagai isu publik yang amat potensial mengganggu *integrasi nasional*.

### III

Apakah demokratisasi di era globalisasi abad ke-21 sudah mengakhiri nyawa politisasi identitas? Kenyataan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia memang telah menyadarkan para pengelola negara untuk berhenti berjudi dengan identitas. Hasilnya, demokratisasi telah memunculkan pengakuan terhadap identitas (kultural). Bahkan, di tengah paranoia menyusul peristiwa 11/9 di New York, negara-negara dunia tidak terjebak pada politisasi identitas keagamaan. Peristiwa Bom Bali atau Bom Marriot pun dikutuk sebagai tindakan kejahatan kemanusiaan. Namun, semua ini tidak berarti kita sudah berhasil mengubur total politisasi identitas.

*Why?*

Negara memang sudah merumuskan Undang-Undang Kewargaan yang merupakan sandaran utama bagi perlindungan dan promosi kewargaan

---

3 Sebelum saya jawab pertanyaan ini, izinkan saya untuk menjelaskan alasan preferensi saya menggunakan "orang" ketimbang "etnis". Istilah "etnis", menurut saya, amat artifisial, hanya ada dalam tulisan Indonesianitas asing. Alasan penggunaannya sendiri tidak jelas. Mungkin ingin menekankan adanya homogenitas budaya sekelompok orang dengan ciri-ciri tertentu. Toh, memang, konsep ini mengarahkan perhatian kita pada persoalan seberapa homogen atau *tidak* homogennya mereka yang hendak kita teliti. Celakanya, di tangan para pembuat kebijakan, konsep ini dikooptasi ke dalam laku-laku teknokratis. Konsep ini menjadi bekal untuk mengendalikan kelompok-kelompok yang dilabelinya homogen. Perhatikan saja berbagai hasil penelitian kaum modernis.

Keberatan kedua, istilah ilmiah seharusnya dirumuskan berdasarkan fakta, bukan membuat kita terasing. Hal ini, misalnya, pernah dikemukakan oleh almarhum Profesor Koentjaraningrat. Menurutnyanya, "orang" lebih umum dikenal dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Frasa "orang Jawa", karakanlah, jauh lebih bumi-berahi daripada "etnis Jawa". Orang Indonesia akan kesulitan memahami istilah yang kedua. Konsepsinya pun, dengan demikian, akan jadi kering, tidak sekaya konsepsi "orang Jawa".

(*citizenship*). Meski demikian, *pertama*, Undang-undang tersebut sebenarnya lebih tepat disebut sebagai Undang-undang *Nationality*, mengingat sama sekali tidak ada hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia yang diatur di dalamnya. Tetapi, *kedua*, katakanlah negara berhasil merumuskan dan mengimplementasikan *law of citizenship*, apakah hal ini efektif untuk mendorong pengakuan terhadap identitas kultural orang Indonesia-Cina (dan khususnya yang beragama Islam), orang Indonesia-Papua, orang Indonesia-Lampung, orang Indonesia-Aceh?

Secara sosiologis, penyusunan perangkat perundang-undangan hanyalah infrastruktur untuk promosi dan proteksi hak budaya orang-orang Indonesia dengan berbagai latar belakang budaya. Namun, Undang-undang tersebut secara sosiologis tidak serta-merta merehabilitasi hak budaya mereka. Dialog lintasbudaya diperlukan! Dalam dialog tersebut, orang Indonesia akan dituntut untuk bekerja sama merumuskan, kata Umar Kayam (1989), “kesepakatan-kesepakatan yang sementara sifatnya.”

Kayam berpendapat bahwa kesepakatan-kesepakatan tersebut pernah kita capai. Namun, karena dominasi kebudayaan tertentu, kesepakatan-kesepakatan tersebut kini terkoyak-koyak.

# DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| PENGANTAR PENULIS  | xi |
| DARI CINA MUSLIM UNTUK INDONESIA <i>WITH LOVE</i>  | xv |
| PENGANTAR HANNEMAN SAMUEL  |    |
| <br>   |    |
| BAB 1  |    |
| PENDAHULUAN  | 1  |
| Mengapa Tionghoa Muslim?   | 1  |
| Unit Analisis, Perspektif Penelitian, dan Metode Analisis Data                               | 11 |
| <br>   |    |
| BAB 2  |    |
| TEORI IDENTITAS SOSIAL<br>DAN SEJARAH PENCARIAN IDENTITAS<br>SOSIAL ETNIS TIONGHOA INDONESIA | 17 |
| Pengertian Identitas Sosial  | 17 |
| Konsep Diri, Identitas Personal, dan Identitas Sosial  | 20 |
| Bagaimana Identitas Sosial Terbentuk?  | 25 |
| Kategorisasi diri  | 25 |
| Perbandingan sosial  | 29 |
| Proses interaksional   | 34 |
| Identitas Sosial dalam Hubungan Antarkelompok  | 37 |
| Strategi Mencapai dan Mempertahankan Identitas Sosial Positif                                | 39 |
| Identitas sosial pada kelompok status rendah ( <i>low-status group</i> )                     | 39 |
| Identitas sosial pada kelompok status tinggi ( <i>high-status group</i> )                    | 41 |
| Identitas Sosial dalam Masyarakat Multikultur  | 44 |
| Dekategorisasi   | 47 |
| Rekategorisasi   | 48 |
| Perbedaan mutual   | 49 |
| Persilangan kategori   | 50 |
| Sejarah Pencarian Identitas Sosial Etnis Tionghoa di Indonesia                               | 52 |

## BAB 3

## NAPAK TILAS KEBERADAAN GOLONGAN

## TIONGHOA MUSLIM DI INDONESIA

|   |     |
|---|-----|
|   | 69  |
| Jejak-Jejak di Permulaan Koloni                             | 69  |
| Kolonialisme Belanda dan Retaknya Harmoni                   | 82  |
| Kemerdekaan Indonesia dan Pengebirian Gaya Baru             | 96  |
| Figur-Figur Penting Tionghoa Muslim Indonesia Pascakolonial | 105 |

## BAB 4

## INDONESIA PASCA-ORDE BARU DAN

## KONTESTASI POLITIK IDENTITAS

## ORANG TIONGHOA MUSLIM

|  |     |
|--|-----|
|  | 123 |
| Janji Keadilan di Indonesia Pasca-Orde Baru          | 123 |
| Meloloskan Diri dari Bayang-Bayang Politik Asimilasi | 134 |
| “Cina Kok Muslim, Mengapa Tidak?”                    | 146 |
| Melampaui Batas-Batas Kategori Peranakan dan Totok   | 162 |

## BAB 5

## IDENTITAS TIONGHOA MUSLIM

## INDONESIA PASCA-ORDE BARU

## Tionghoa Muslim Indonesia, Siapakah Mereka?

## Ragam Ekspresi Identitas Tionghoa Muslim

## di Indonesia Pasca-Orde Baru

|   |     |
|---|-----|
|   | 173 |
|   | 173 |
|   | 175 |
| Menjadi nasionalis dalam arena politik                        | 176 |
| Bangga menyandang identitas minoritas ganda                   | 195 |
| Menjadi Tionghoa tidak harus menjadi pedagang                 | 210 |
| Asimilasi melalui perkawinan campuran                         | 233 |
| Biarkan saya menjadi perempuan Melayu                         | 246 |
| Menegaskan kejawaan, meneguhkan keindonesiaan                 | 254 |
| Diskusi dan Analisis  | 266 |
| Faktor penyebab keislaman                                     | 267 |
| Islam dan transformasi identitas sosial                       | 269 |
| Keluarga sebagai medan asimilasi                              | 272 |
| Konstestasi identitas dalam ruang budaya <i>mainstream</i>    | 276 |
| “Kami” tidak lagi sama, namun juga tidak berbeda              |     |
| dengan “Kalian”: Hibriditas sebagai kemenduaan yang produktif | 281 |
| Refleksi: Multikulturalisme Indonesia dan Politik Pengakuan   | 288 |

|   |     |
|---|-----|
| BAB 6   |     |
| IDENTITAS TIONGHOA MUSLIM INDONESIA<br>DALAM RUANG WACANA <i>CHINESE STUDIES</i><br>DAN TEORI IDENTITAS: SEBUAH REFLEKSI TEORETIS | 293 |
| Implikasi bagi <i>Chinese Studies</i> di Indonesia  | 294 |
| Usangnya kategori peranakan dan totok   | 297 |
| Bergesernya makna loyalitas terhadap negara   | 299 |
| Permeabilitas identitas Tionghoa pasca-Orde Baru  | 301 |
| Islam dan perluasan agensi  | 303 |
| Menuju politik kewargaan nonrasial  | 306 |
| Implikasi bagi Pengembangan Perspektif dalam Studi Identitas  | 309 |
| Kerangka kerja pembentukan identitas multidimensional   | 312 |
| Proses pembentukan identitas multidimensional   | 315 |
| Pembentukan identitas multidimensional<br>pada orang Tionghoa Muslim Indonesia  | 322 |
| <br>  |     |
| BAB 7   |     |
| PENUTUP: JAWABAN YANG MENJADI PERTANYAAN  | 327 |
| <br>  |     |
| DAFTAR PUSTAKA  | 331 |
| Majalah dan Koran   | 350 |
| Laman Internet  | 351 |
| <br>  |     |
| INDEKS  | 352 |
| <br>  |     |
| TENTANG PENULIS   | 356 |